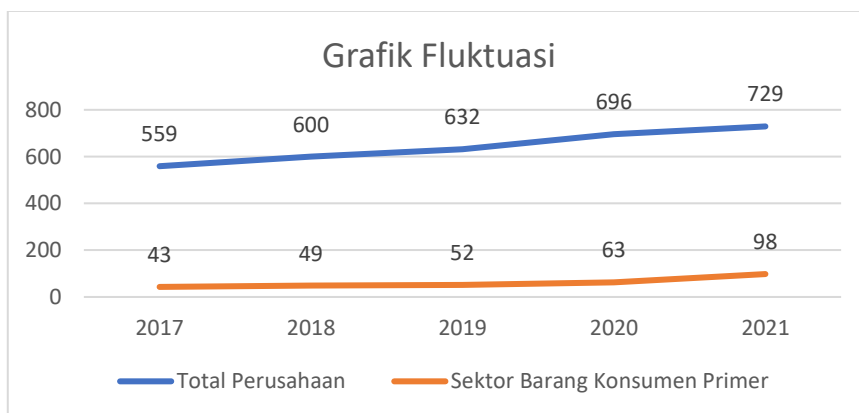


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan Bursa Efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana dengan tujuan memperdagangkan Efek. Efek adalah surat berharga yang bernilai dan dapat diperdagangkan atau disebut juga saham perusahaan. Badan hukum ini mempunyai peran penting bagi perusahaan *go public*, dikarenakan wadah bagi emiten untuk memperdagangkan saham mereka kepada pihak eksternal. Pada 25 Januari 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 11 sektor yang disebut *Indonesia Stock Exchange Industrial Classification (IDX-IC)*, yang salah satunya sektor barang konsumen primer yang terdiri dari subsektor *food & staples retailing, food & beverage, tobacco, nondurable household products*. Industri barang konsumen primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang atau jasa kepada konsumen tetapi untuk barang yang bersifat anti-sikilis atau barang primer sehingga permintaan barang atau jasa tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi karena konsumen akan terus melakukan permintaan untuk memenuhi kebutuhannya.



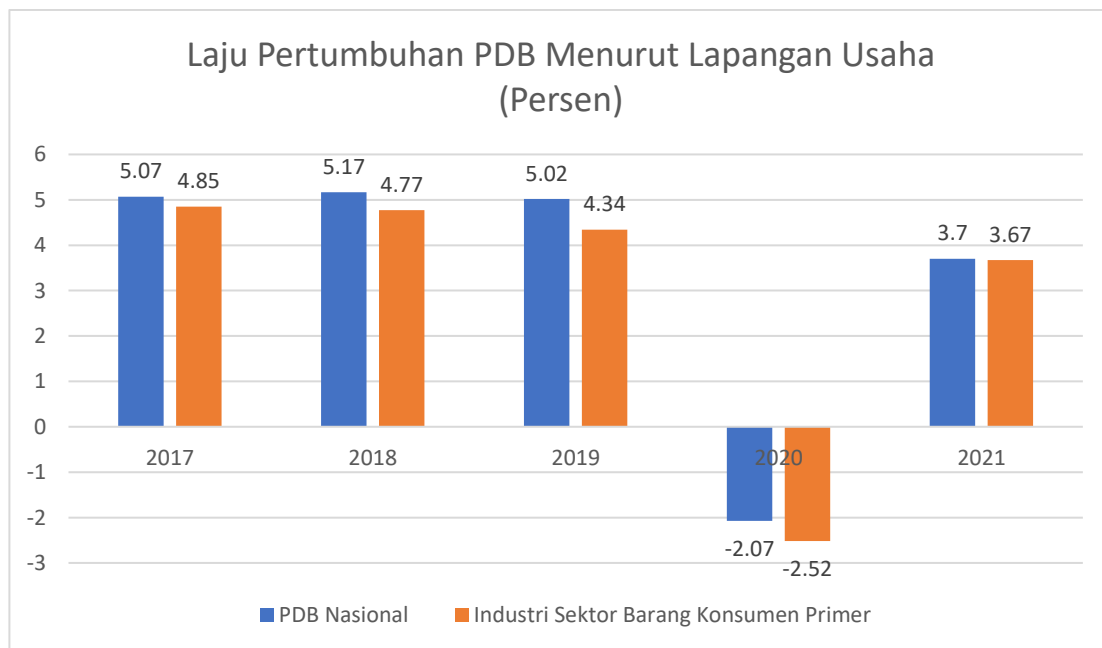
Gambar 1.1

Jumlah Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer 2017-2021

Sumber: www.idx.co.id (Data yang telah diolah penulis, 2023)

Gambar 1.1 menunjukkan secara berturut-turut pada tahun 2017-2021 mengalami kenaikan perusahaan yang tercatat. Pada tahun 2017 perusahaan *consumer non-cyclicals* tercatat sebanyak 43 perusahaan dengan total perusahaan pada BEI 599 perusahaan. Pada tahun 2018, total perusahaan *consumer non-cyclicals* tercatat sebanyak 49 perusahaan dari 600 total perusahaan tercatat di BEI dengan persentase sebesar 8,2%. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 8,2% dan 9,1% tidak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2021, total perusahaan *consumer non-cyclicals* tercatat sebanyak 98 perusahaan dari 729 total perusahaan tercatat di BEI dengan persentase sebesar 13,4%.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia menurut produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2021 secara kumulatif tumbuh mencapai 3,70 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -2,07 (Badan Pusat Statistik, 2021).



Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Sumber: www.bps.go.id (Data yang telah diolah penulis, 2023)

Menurut gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan industri barang konsumen primer pada tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi terhadap PDB nasional. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 4,85% dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 4,77% dan 4,34%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 6,86% menjadi -2,52%. Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 6,19% menjadi 3,67%. Dapat diartikan bahwa industri barang konsumen primer juga menjadi salah satu penyokong PDB nasional dikarenakan kebutuhan pokok dan barang habis pakai dengan jenis barang *non-durable goods* atau jenis barang akan habis manfaat. Bahkan menurut data BEI pada kuartal empat tahun 2021 indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat 0,78% posisi 6.536,904 dengan penyokong indeks sektor industri pada posisi kedua sektor barang konsumen primer naik sebesar 1,75% (Fernando, 2021). Hal ini menjadi daya tarik investor untuk menginvestasikan saham mereka pada sektor barang konsumen primer karena memiliki potensi besar dalam menjaga kestabilan pendapatan. Perusahaan sektor barang konsumen primer sering melakukan ekspansi usaha sehingga perusahaan membutuhkan pembiayaan dan dana yang lebih besar agar menjaga eksistensinya. Eksistensi suatu perusahaan sangat tergantung pada kepercayaan pihak eksternal.

Hal ini harus dijaga oleh perusahaan dengan cara menyajikan laporan keuangan untuk keperluan informasi bagi para pihak investor. Selain itu, keterlambatan publikasi laporan keuangan akan menyebabkan adanya indikasi masalah dalam laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan dengan tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan terbuka.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2023) perusahaan wajib menerapkan pernyataan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan lengkap, terdiri dari: laporan posisi keuangan; laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan (berisi informasi kebijakan akuntansi material); dan laporan

lainnya (IAI, 2023). Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan perusahaan dalam memberikan keputusan ekonomi (Tampubolon & Siagian, 2020). Laporan keuangan salah satu hal penting bagi perusahaan untuk analisa manajemen atas operasi berkala yang menjadikan prospek untuk kelanjutan perusahaan.

Perusahaan publik menyimpan informasi keuangan mereka melalui internet untuk menjangkau pengguna laporan keuangan yang lebih luas (Sukmadilaga et al., 2019). Perusahaan yang terdaftar di BEI sangat membutuhkan laporan tahunan yang berisi laporan keuangan untuk di publikasi sebagai penunjang informasi prospek keberlanjutan suatu perusahaan. Akan tetapi, perusahaan yang terdaftar tidak hanya sekedar publikasi laporan tahunan tetapi harus disertai laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Hal ini disampaikan dalam keputusan ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan. Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan. Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Laporan keuangan yang baik harus melalui proses audit terlebih dahulu, namun lama waktu audit itu juga diperhitungkan karena akan berakibat kepada kualitas suatu laporan keuangan. Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan maka akan disebut dengan keterlambatan laporan keuangan atau *audit report lag*. *Audit report lag* merupakan jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan dari tanggal penutupan tahun buku hingga laporan auditor independen ditandatangani (Pratiwi & Nurbaiti, 2021). Salah satu tujuan kualitatif laporan keuangan adalah ketepatanwaktuan, namun lama waktu audit atau *audit report lag* dapat mempengaruhi ketepatanwaktuan dalam penyampaian laporan keuangan (Rosalia et al., 2019). Periode waktu antara tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan juga disebut dengan *audit report lag*, semakin lama auditor menyelesaikan auditnya maka semakin panjang *audit report lag*

yang mengakibatkan informasi laporan keuangan menjadi tidak berkualitas yang menimbulkan efek negatif terhadap perusahaan sehingga mempengaruhi keputusan bagi para pengguna laporan keuangan (Yanthi et al., 2020).

Akan tetapi, fakta yang terjadi pada saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan sehingga diberikan sanksi. Terdapat jumlah perusahaan yang melakukan *audit report lag* pada sektor barang konsumen primer pada tahun 2017-2021:

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Mengalami *Audit Report Lag* Pada Tahun 2017-2021

Tanggal Tahun Berakhir	Jumlah Perusahaan yang Terlambat
31 Desember 2017	4 Perusahaan
31 Desember 2018	6 Perusahaan
31 Desember 2019	21 Perusahaan
31 Desember 2020	26 Perusahaan
31 Desember 2021	7 Perusahaan

Sumber: www.idx.com (Data yang telah diolah penulis, 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 yang mengalami *audit report lag*. Pada tahun 2017 terdapat 4 perusahaan yang melakukan *audit report lag*, diantaranya yaitu PT FKS Food Sejahtera (180 hari), PT Central Proteina Prima (173 hari), PT Siantar Top (157 hari), PT Bakrie Sumatera Plantations (135 hari). Pada tahun 2018 terdapat 6 perusahaan yang terindikasi *audit report lag*, diantaranya yaitu PT FKS Food Sejahtera (401 hari), PT Golden Plantation (317 hari), PT Indonesian Tobacco (129 hari), PT Mulia Boga Raya (170 hari), PT Diamond Food Indonesia (178 hari), dan PT Widodo Makmur Perkasa (144 hari).

Pada tahun 2019 sebanyak 21 perusahaan mengalami *audit report lag*, antara lain yaitu PT FKS Food Sejahtera (178 hari), PT Eagle High Plantations (121 hari), PT Central Proteina Prima (267 hari), PT Dharma Samudera Fishing Indust (136 hari), PT Golden Plantation (864 hari), PT Jaya Agra Wattie (149 hari), PT Multi Agro Gemilang

Plantation (129 hari), PT Malindo Feedmil (121 hari), PT Matahari Putra Prima (126 hari), PT Mustika Ratu (148 hari), PT Siantar Top (148 hari), PT Wicaksana Overseas Internation (154 hari), PT Dua Putra Utama Makmur (149 hari), PT Cottonindo Ariesta (140 hari), PT Garudafood Putra Putri Jaya (129 hari), PT Estika Tata Tiara (163 hari), PT Mulia Bogo Raya (143 hari), PT Asia Sejahtera Mina (132 hari), PT Bumi Teknokultura Unggul (150 hari), PT Widodo Makmur Perkasa (158 hari), dan PT Prima Cakrawala Abadi (141 hari). Pada tahun 2020 merupakan tahun terbanyak tercatat perusahaan mengalami *audit report lag* sebanyak 26 perusahaan, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan tercatat sebanyak 7 perusahaan.

Dalam praktiknya masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami *audit report lag* dimana hal tersebut, cenderung merugikan pengguna laporan keuangan dalam mendapatkan informasi keuangan secara lengkap agar tidak menyesatkan para pengguna laporan tersebut.

Pada kasus PT FKS Food Sejahtera Tbk. (AISA) terancam *delisting* karena pada 5 Juli 2020 telah melewati masa suspensi selama 24 bulan (Saleh, 2020). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit report lag* diantaranya terdapat dugaan penggelembungan dana yang diungkapkan oleh KAP Ernst & Young (EY), yaitu pada pos piutang usaha membukukan sebesar Rp2,11 trilliun sedangkan pada hasil *restatement* membukukan sebesar Rp485,71 miliar (penggelembungan sebesar Rp1,63 trilliun). Kemudian pada pos persediaan membukukan sebesar Rp1,4 trilliun sedangkan pada hasil *restatement* membukukan sebesar Rp91,91 miliar (penggelembungan sebesar Rp1,31 trilliun). Sedangkan pada pos aset tetap membukukan sebesar Rp3,18 trilliun dan pada hasil *restatement* membukukan sebesar Rp824, miliar (penggelembungan sebesar Rp2,35 trilliun). Tidak hanya faktor temuan penggelembungan yang menjadikan *audit report lag*, saat rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 27 Juli 2018 sebanyak 61% pemegang saham menolak untuk mengesahkan laporan keuangan tahun buku 2017 karena mayoritas pemegang saham tidak percaya dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi (Fajrian, 2020).

Adapun fenomena lainnya, PT Golden Proteina Tbk. (GOLL) yang terancam *delisting* karena pada 30 Januari 2021 saham perusahaan GOLL telah *suspend* selama 24 bulan, diketahui bahwa ikut terseret kasus PT AISA yang menyebabkan anak perusahaan mereka berstatus pailit (Forddanta, 2021). Tidak hanya faktor tersebut yang menyebabkan *audit report lag*, berdasarkan pengumuman BEI tahun 2021 terdapat 52 emiten dikenakan peringatan II dan denda Rp 50 juta atas belum menyampaikan laporan keuangan tahun berjalan, terdapat 7 perusahaan sektor barang konsumen primer (Sandira, 2021). Salah satunya perusahaan GOLL belum menyerahkan laporan keuangan tahun buku 2019-2021, disebutkan bahwa keterlambatan penyelesaian laporan keuangan (*audit report lag*) akibat dari regulasi pandemi bahwa membatasi pekerja 100% *work from office* (Forddanta, 2021).

Berdasarkan fenomena di atas, penulis berpendapat bahwa masih terdapat *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer. Pada penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit report lag*, sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan tiga faktor yang dapat mempengaruhi berapa lama waktu audit yang dilakukan auditor independen terhadap suatu laporan keuangan perusahaan, seperti kepemilikan institusional, *gender diversity*, dan *audit tenure*, sebagai berikut:

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi, lembaga, dan institusi lainnya. Kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana perwalian serta institusi lain (Juniarti & Sentosa, 2019; dalam Kristiana & Annisa, 2022). Ketika kepemilikan institusional lebih besar, maka akan mendorong perusahaan untuk segera melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu (Merdianto et al., 2021). Adapun dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kristiana & Annisa (2022) dan Frischanita (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan dalam penelitian Utomo & Sawitri (2021) tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Pengukuran yang

dilakukan untuk mengetahui hasil kepemilikan institusional, jumlah saham institusi dibagi dengan jumlah saham beredar (Frischanita, 2018).

Faktor selanjutnya, *gender* merupakan salah satu faktor individu yang mempengaruhi etos kerja. Peneliti Susandya & Suryandari (2021) mengatakan semakin besar jumlah anggota komite perempuan, maka semakin pendek rentang waktu pemeriksaan audit, dikarenakan kecenderungan perempuan untuk lebih teliti dan lebih cepat berkomunikasi dengan manajemen maupun auditor. Adanya anggota komite audit perempuan dianggap dapat mempengaruhi laporan keuangan, bahkan dapat mempersingkat waktu proses audit sehingga dapat menekan terjadinya *audit report lag* (Susandya & Suryandari, 2021). Berdasarkan penelitian Chalu (2021) dan Susandya & Suryandari (2021) menyebutkan bahwa *gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Namun, pada penelitian Wandrianto et al. (2021) dan Pratiwi & Triyanto (2021) tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penulis mengukur *gender diversity* dengan indikator anggota komite perempuan dibandingkan dengan jumlah komite audit (Susandya & Suryandari, 2021).

Audit tenure diindikasikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *audit report lag* karena pergantian auditor akan berdampak pada efektifitas pelaksanaan audit. *Audit tenure* adalah jangka waktu masa perikatan kerja KAP atau auditor dalam memeriksa laporan keuangan, melalui surat keputusan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, mengatur tentang pemberian jasa audit umum 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan publik dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik untuk satu klien yang sama. Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan dalam peraturan. Pada tahun 2015, mengalami pembaruan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktikan Akuntan Publik, menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan oleh akuntan publik (auditor) dibatasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut, sedangkan kantor akuntan publik tidak ada pembatasan dalam pemberian jasa audit. Apabila perusahaan ingin meminta jasa audit dengan akuntan publik yang sama harus melakukan *cooling-off* selama 2 tahun berturut-turut. Sihombing (2021) menyatakan dalam penelitiannya

bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian Tampubolon & Siagian (2020) dan Mayling & Prasetyo (2020) menyebutkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Peneliti mengukur *audit tenure* dengan menghitung periode pertama perikatan dengan angka 1 (satu) dan ditambah dengan 1 (satu) untuk periode berikutnya, jika terjadi pergantian akuntan publik maka akan dimulai dengan angka 1 (satu) (Tampubolon & Siagian, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi signifikan atau tidak terhadap *audit report lag* dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Gender Diversity, dan Audit Tenure Terhadap Audit Report Lag (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pada saat ini di Indonesia masih banyak perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, akan tetapi keterlambatan yang dilakukan akan merugikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham (*shareholder*) serta kemungkinan besar saham perusahaan dibekukan (suspensi).

Laporan keuangan penting untuk disampaikan secara tepat waktu karena akan berpengaruh besar terhadap pengambil keputusan oleh pengguna laporan keuangan. *Audit report lag* serta faktor-faktornya mempengaruhi kinerja dari auditor untuk menyelesaikan tugas audit laporan keuangan. Banyak penelitian yang dilakukan akan tetapi terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian.

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional, *gender diversity*, dan *audit tenure* secara simultan berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
2. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
3. Apakah *gender diversity* secara parsial berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?
4. Apakah *audit tenure* secara parsial berpengaruh terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, *gender diversity*, dan *audit tenure* secara simultan terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional secara parsial terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh *gender diversity* secara parsial terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* secara parsial terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, dari segi aspek teoritis maupun aspek praktis sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan untuk waktu penyampaian laporan keuangan dan menyelesaikan laporan keuangan diaudit. Serta mengetahui pengaruh kepemilikan insitusional, *gender diversity*, dan *audit tenure* terhadap *audit report lag*.

b. Bagi Investor

Investor diharapkan mendapat informasi mengenai pengaruh terhadap *audit report lag* serta mempermudah investor dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Akuntan Publik dan KAP

Diharapkan bagi akuntan publik dan KAP dapat mempertimbangkan penelitian ini dalam melaksanakan tugas audit. Sehingga pengendalian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dapat mengurangi terjadinya *audit report lag*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Diharapkan dengan adanya sistematika penulisan tugas akhir mempermudah bagi pembaca untuk memahami serta menguasai isi dari tiap bab yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri 5 (lima) bab dan beberapa sub bab, sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi penjelasan umum secara ringkas dan mendeskripsikan isi penelitian secara akurat. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian,

latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (aspek teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang relevan dengan penelitian mulai dari umum sampai ke khusus. Disertai dengan penelitian terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian dan diakhiri dengan hipotesis penelitian (jika ada).

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan, jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan sampel penelitian, analisis model dan hipotesis dan pengaruh variabel independen terhadap dependen yang diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir berisi kesimpulan penelitian serta saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian (aspek teoritis dan aspek praktis).